

POLITICAL PARTY STRATEGIES TO INCREASE WOMEN'S REPRESENTATION IN THE ELECTION CONTESTS FOR TANJUNGPINANG CITY DPRD MEMBERS

STRATEGI PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG

Siti Aminah

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia (Nama instansi/Afiliasi)

* Penulis Korespondensi: emmysolina@umrah.ac.id

Emmy Solina²

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tyka Rahman³

³ Institut Agama Islam Negeri, Bukit Tinggi

Indah Sari Rahmaini⁴

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Abstract

Democracy provides broad opportunities for all citizens to fulfill the requirements to vote and be elected as representatives of society without discrimination of ethnicity, race, religion and gender. This is reinforced by the affirmative policy of the government which stipulates the provision of a 30 percent quota for women to occupy political positions. 2 of 2008 concerning Political Parties. The law regulates that political parties participating in the election include 30 percent of women's representation in the nomination of legislative members, namely in Article 8 paragraph (1), one of which is letter (d), namely: "involving women's representation of at least 30% (thirty percent) as the management of political parties at the local level. center". This study aims to determine the strategy of political parties in increasing women's representation in the nomination of members of the legislature. The method used is descriptive qualitative. The informants in this study were determined by purposive sampling, so that the researchers took three political parties, namely, the Prosperous Justice Party (PKS), the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), and the Golkar Party (GOLKAR) as informants. Field data obtained by using observation, documentation and in-depth interview techniques. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation to the conclusion stage. Based on the results of the research that has been carried out, it shows that the role of political parties is large enough to increase women's representation in the nomination of legislative members. This role can be seen from the various strategies carried out by the party to increase women's representation. The strategy is built through the following approaches: the approach of women's organizations, the approach of community leaders, and the approach of community empowerment programs.

Keywords: Gender, Affirmation Policy, Patriarchal Culture

Abstrak

Demokrasi memberikan kesempatan luas kepada seluruh warga negara dalam memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih sebagai perwakilan masyarakat tanpa adanya diskriminasi suku, ras, agama dan gender. Hal ini dikuatkan dengan kebijakan afirmasi dari pemerintah yang menetapkan ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan dalam politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UU tersebut mengatur partai peserta Pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu pada Pasal 8 ayat (1), salah satunya adalah huruf (d) yaitu: “melibatkan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh perseratus) sebagai kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitiannya ini ditentukan dengan *purposive sampling*, sehingga peneliti mengambil tiga partai politik yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagai informan. Perolehan data lapangan dihasilkan dengan teknik observasi, dokumentasi dan teknik wawancara mendalam. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data hingga tahap kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran partai politik cukup besar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislative. Peran tersebut dilihat dari berbagai strategi yang dilakukan partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Strategi tersebut dibangun melalui pendekatan berikut: pendekatan organisasi perempuan, pendekatan tokoh masyarakat, dan pendekatan program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Gender, Kebijakan Afirmasi, Budaya Patriarki

Pendahuluan

Partisipasi perempuan Indonesia terhadap perpolitikan, bukanlah dianggap sebagai hal yang baru lagi. Aktivis perempuan Indonesia juga aktif memperjuangkan hak suaranya pada pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Perjuangan aktivis perempuan tersebut dibantu oleh partai politik yang membentuk organisasi sayap perempuan dalam badan partai guna menyaring suara perempuan dalam pemilu tersebut. Perjuangan politik perempuan di Indonesia dapat dilihat dari tiga peristiwa politik penting di Indonesia. Peristiwa yang pertama pada pemilu legislatif 5 april 2004, memperlihatkan adanya kenaikan jumlah anggota perempuan di parlemen pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pada peristiwa yang kedua, pemilu presiden pilihan rakyat secara langsung yang dilakukan dua kali, tanggal 5 juli 2004 dan 20 september 2004 yang pertama kali dilakukan di Indonesia, adanya perempuan sebagai salah satu kandidat calon presiden yaitu, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Pada peristiwa ketiga menunjukkan keberhasilannya dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam perkembangan partai politik di Indonesia yang semakin pesat dengan berbagai hal yang ditandai oleh banyaknya pendirian partai-partai politik. Diketahui jumlah partai politik yang ada sebanyak 18 partai (KPU Kota Tanjungpinang, 2019). Adapun dari 18 partai tersebut, jumlah anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang terpilih menurut jenis kelamin tahun 2009 – 2019 dapat dilihat pada tiga tahap pemilihan berikut ini

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2009-2019

Tahun Pemilu	Jumlah Keterwakilan Anggota DPRD	
	Laki-laki	Perempuan
2009	22	3
2014	22	8
2019	19	11

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang

Dari tabel tersebut terlihat seiring perkembangannya, partisipasi masyarakat dalam dunia politik terus mengalami peningkatan. Walaupun partai politik terus bertambah, namun dari segi keterlibatan perempuan di dalam partai tidak signifikan dengan jumlah kaum laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam politik masih terdapat kesenjangan diantara jumlah laki-laki dan perempuan pada keterwakilan lembaga legislatif. Dalam hal ini dapat dilihat kesenjangan dari setiap partai dalam memunculkan keterwakilan antara perempuan dan laki-laki dari tahun 2009 – 2019, berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2009

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Partai Karya Peduli Bangsa	1	-	1
2.	Partai Keadilan Sejahtera	2	1	3
3.	Partai Amanat Nasional	3	-	3
4.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1	-	2
5.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1	-	1
6.	Partai Golongan Karya	3	-	3
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	-	2
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	-	4
9.	Partai Demokrat	3	-	3
10.	Partai Demokrasi Pembaruan	-	1	1
11.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1	-	1
12.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1
Jumlah		22	3	25

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang

Pada tabel tersebut menggambarkan keterwakilan perempuan dalam legislatif masih sangat kecil, sementara jumlah pemilih perempuan mayoritas cukup banyak. Perempuan yang terpilih dalam memimpin di lembaga legislatif hanya berjumlah 3 orang atau dengan kata lain keterwakilan perempuan di DPRD hanya 12%. Kemudian jika dilihat pada tahun selanjutnya

mengalami perkembangan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PDI Perjuangan	6	1	7
2	Partai Golongan Karya	3	1	4
3	Partai Hati Nurani Rakyat	3	1	4
4	Partai Demokrat	2	1	3
5	PartaiGerakan Indonesia Raya	2	1	3
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	1	3
7	Partai Amanat Nasional	1	1	2
8	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	2
9	Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia	2	-	2
	Jumlah	22	8	30

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang

Pada tabel tersebut terlihat peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki yang mengalami perkembangan untuk mencapai kemajuan. Kemudian jika dilihat pada tahun selanjutnya dapat digambarkan pada data berikut ini :

Jumlah Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2019

No	NamaPartai	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	2	5
2	Golongan Karya	4	1	4
3	Nasional Demokrat	3	1	4
4	Gerakan Indonesia Raya	3	1	4
5	Partai Keadilan Sosial	2	1	3
6	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
7	Partai Amanat Nasional	1	1	2
8	Hati Nurani Rakyat	1	1	2
9	Demokrat	1	1	2
10	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	2
	Jumlah	19	11	30

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang

Dari tabel yang telah dipaparkan tersebut, terlihat bahwa kesenjangan perempuan di legislatif belum terpenuhi secara signifikan. Maka, berangkat dari peristiwa tersebut dibutuhkan strategi bagaimana perempuan ini bisa berimbang yang terpilih untuk menjadi caleg antara laki-laki dan perempuan. Strategi yang dibangun oleh partai telah mempresentasikan keterwakilan perempuan menuju pada kemajuan pada tahun 2019 ini.

Representasi politik perempuan cukup penting apabila ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (Nurchahyo, 2016;25). Dengan demikian, Pemerintah menetapkan ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki suatu jabatan politik yang terdapat dalam Undang-undang tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kemudian bersama dengan ini, diterbitkan kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Undang-undang tersebut mengatur bahwa partai peserta Pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu peserta dan persyaratan mengikuti pemilu pada Bab III Pasal 8 ayat (2), salah satunya adalah huruf (e) yaitu: "*menyertakan sekurang-kurangnya 30% dari keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*".

Rendahnya jumlah perempuan yang dimajukan oleh sebagian partai politik telah menghadirkan kelompok-kelompok yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan. Dengan adanya kuota 30% perempuan dalam partai maupun dalam mempromosikan calon legislatif perempuan, sehingga pentingnya memasukkan lebih banyak perempuan dalam posisi strategis di bidang politik menjadi suatu syarat diperlukannya suatu partai untuk masuk dalam pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilu yang diterapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif, hal ini telah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30% di parlemen. Dalam mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan di lembaga legislatif dari total caleg mulai dari tingkat pusat, hingga provinsi, maupun kabupaten/kota, hal ini merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap partai politik. Adapun sanksi yang diterima oleh partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% tersebut, maka tidak diikutsertakan partainya dalam pemilu (kiftiyah Anifatul, 2019). Dalam kesempatan ini, diharapkan setiap partai dapat menjadi tonggak awal bagi negara sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah dan termasuk juga di pusat

Melalui kuota 30% dalam parlemen dianggap penting, Hal ini karena termasuk aksi mendukung (*affirmative action*) bagi perempuan untuk memasuki ranah politik. Maksud dari hal tersebut adalah dengan harapan memberikan kesempatan yang luas untuk perempuan maju ke ruang publik dan menempati posisi strategis pengambilan keputusan guna untuk mewakili kepentingan mereka. Namun dengan kondisi sosiokultur yang kuat dengan budaya patriarkinya, hal ini menjadi suatu faktor rendahnya untuk aktualisasi perempuan dalam mengambil kebijakan bangsa ini (Putri,2020:2). Bahkan dengan diberlakukannya peraturan mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam keanggotaan partai politik, realisasinya diawal masih menyulitkan perempuan dalam berpartisipasi aktif karena adanya sistem nomor urut dan administarsi yang sulit bagi perempuan untuk menjadi salah satu kandidat yang dicalonkan dalam pemilu. Hal ini berangkat dari faktor budaya yang belum mencapai pada konsep kesejajaran dan persamaan antara peran laki-laki dan peran perempuan dalam setiap bidangnya sehingga peran perempuan pada bidang politik Indonesia masih minim. Selain daripada itu, struktur sosial yang terbentuk menempatkan posisi perempuan sebagai objek pembangunan. Salah satu yang menjadi faktor penyebab hal tersebut adalah *stereotype* mengenai perempuan sebagai orang yang dipimpin. Hal ini memosisikan peran perempuan

selalu pada sisi keterbelakangan, dan tidak cocok menempati posisi sebagai pengambil keputusan dibidang politik seperti anggota legislatif.

Anggota dewan yang duduk dilembaga legislatif merupakan representasi masyarakat dalam menentukan tata penyelenggaraan suatu pembangunan. Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama agar aspirasi kaum laki-laki dan kaum perempuan dapat disampaikan melalui wakilnya yang berhasil duduk dilembaga legislatif. Dilihat dari kapasitas laki-laki maupun perempuan yang tidak seimbang jumlahnya dimana perempuan walaupun sudah diakui oleh Undang-Undang kapasitas mereka hanya 30%. Inilah yang mengakibatkan budaya yang berkembang di masyarakat masih berpengaruh untuk keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan. Sebagaimana budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kekuasaan peran politik, moral, dan sosial di Indonesia masih mencengkeram perempuan dalam bekerja. Berkaitan dengan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat inilah yang menimbulkan anggapan pada sebagian masyarakat secara umum bahwa dunia politik identik dengan laki-laki. Pandangan ini menimbulkan gambaran kondisi yang hanya mampu dihadapi oleh kaum laki-laki, bahwa politik itu keras, kotor, penuh intrik dan sejenisnya. Kesan tersebut juga disebabkan karena pada perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan lembaga atau aktivitas pekerjaan diluar rumah, sementara perempuan hanya terdoktrin pada tugas-tugas yang memfokuskan dalam menyiapkan kebutuhan keluarga dirumah seperti, mendidik anak, memasak, mengasuh, serta melayani suami

Seiringnya zaman yang terus berkembang, tingkat globalisasi informasi dan modernisasi serta keberhasilan gerakan feminisme dan emansipasi perempuan, peran serta sikap perempuan khususnya, termasuk pandangannya dalam dunia politik mulai mengalami pergeseran. Perempuan tidak lagi hanya sekedar memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dengan menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, namun perempuan sudah turut serta aktif berperan di berbagai sisi bidang kehidupan yang mengarah pada peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh kaum perempuan, baik sosial, politik maupun ekonomi. Dalam hal ini, perempuan sudah mampu terlibat ke sektor publik, namun jumlahnya dalam proses keterlibatan masih relatif kecil. Terlebih pada bagian politik. Hal ini sangat kontras dengan presentase dari jumlah penduduk perempuan di Indonesia.

Berdasarkan penuturan tersebut, menggambarkan fenomena yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam politik, hal inilah yang mengakibatkan mereka enggan untuk ikut berpartisipasi karena masyarakat juga memandang mereka tidak layak untuk berpartisipasi, tidak ada kemampuan mereka untuk berpartisipasi di politik. Sementara dalam menyikapi budaya patriarki dan stereotip yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat di kota Tanjungpinang, partai-partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam membangun wawasan perempuan untuk mampu menjalankan peran di bidangnya, sehingga memunculkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif untuk memberikan kontribusi yang baik dalam memperjuangkan masalah yang terjadi khusus pada kehidupan kaum perempuan.

Tulisan ini mencoba menjelaskan pentingnya strategi dari partai untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan memaparkan bahwa seorang perempuan tidak menjadi penghalang untuk tetap andil dalam kehidupan sosial masyarakat karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan semua mempunyai posisi dan

peran masing-masing seperti dirumah, di publik, maupun pada kehidupan masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya selama perempuan memiliki kapasitas yang baik, maka hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan. Namun dalam hal ini, perempuan harus terus berusaha untuk lebih mendalami dan belajar terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan kebutuhan lainnya dari tuntutan kerja yang seharusnya bisa untuk dipenuhi.

Metode

Pada Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah perempuan yang menjadi pengurus inti dari partai politik. Lokasi yang diambil ialah beberapa partai politik (PDI Perjuangan, PKS, dan Golkar) di Kota Tanjungpinang. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Kemudian sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, peneliti menggunakan 3 metode, yakni observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Dengan alat yang digunakan adalah handphone untuk merekam, kamera untuk dokumentasi dan buku sebagai catatan penulis. Analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, reduksi data, penyajian, data penarikan kesimpulan (verifikasi). Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab dan dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hasil dan Diskusi

A. Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Tanjungpinang

Partai politik menurut Miriam Budhardjo sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan cara merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan partai politiknya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material (Said, 2007:221).

Melalui partisipasi politik yang dijalankan kepada setiap individu maupun setiap kelompok masyarakat, maka akan dapat mewujudkan segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Berdasarkan jenis-jenis partisipasi politik, setidaknya ada tiga jenis partisipasi yang mana partai politik ikut terlibat di dalamnya, yakni kegiatan pemilihan, lobbying, dan kegiatan organisasi. Di tiga jenis partisipasi ini, kedudukan partai politik benar-benar diperhitungkan dan sangat besar berpengaruh.

Dalam kegiatan pemilihan atau pemilu, partai politik sangat berperan dan berpartisipasi aktif sebagai pemilih dari calon-calon legislator atau pimpinan eksekutif. Sebagai agen partisipasi politik, partai politik haruslah menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam pembuat kebijakan. Disinilah peran kehadiran partai politik menjadi penting dalam setiap kali pemilu. Dikarenakan kehadiran partai politik memberikan kesempatan bagi semua pihak tidak terkecuali bagi kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam politik negara. Kader-kader terbaik di partai politik diajukan sebagai calon-calon pemimpin bangsa untuk bertarung dengan calon dari partai politik lainnya. Untuk konteks Indonesia sampai saat ini hanya partai politik yang memiliki keabsahan untuk mencalonkan seseorang dalam pemilu.

Tidak hanya partai politik, negara juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk

berpartisipasi aktif dalam dunia politik dengan cara membuat peraturan seperti pada Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan pada pengurusan partai politik tingkat pusat jadi syarat kepesertaan pemilu”, dan disahkan Undang-undang, Nomor 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif (DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II). Kebijakan tersebut merupakan sebuah legitimasi politik Negara yang harus dimanfaatkan sebagai momentum politik bagi perempuan dalam mengartikulasikan kemampuannya sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan potensi yang baik untuk turut memecahkan persoalan bangsa dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai manifestasi peran sosok perempuan dalam cakupan luas pada setiap sisi bidang dan perpolitikan yang praktis.

Dari pandangan beberapa informan dalam penelitian ini, perempuan dalam politik di kota Tanjungpinang memiliki peran dan basic yang cukup luas, sebagaimana kaum perempuan tidak hanya memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Namun kaum perempuan juga mampu memegang peranan penting di lembaga publik. Apabila dilihat dari peran perempuan dalam politik, mereka memiliki kontribusi yang besar dalam tugasnya terutama pada bidang pelayanan kepada masyarakat dan negara. Dari sinilah pentingnya perhatian partai politik terhadap peran perempuan dalam segala lini kehidupan, karena perempuan dalam kiprahnya adalah peyumbang dan memberikan kontribusi kepada kehidupan bernegara.

Perhatian partai politik terhadap peran perempuan di kota Tanjungpinang tidak berkurang sedikitpun, bahkan semua partai sangat memprioritaskan peraturan yang telah pemerintah tetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 56 dengan berbunyi bahwa daftar calon yang diajukan oleh parpol memuat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. Hal tersebut menggambarkan betapa Negara ini memberikan penghargaan atas peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh para wanita. Bahkan perubahan sebuah bangsa menjadi maju dan bermartabat juga tak lepas dari peran dan kontribusi wanita sebagai seorang ibu. Selain itu, peran lainnya menunjukkan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam suatu pemerintahan merupakan bagian besar daripada hak-hak politik setiap manusia. Sebagaimana dalam teori feminisme dari sisi pendekatan feminisme liberal kontemporer, gerakan ini ingin menjadikan perempuan agar lebih aktif dalam perannya di politik dunia, untuk meraih hak yang dibutuhkan pada setiap kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan teori feminisme diatas, maka diharapkan partai politik harus bisa terbebas dari stereotip yang menganggap bahwa politik itu hanya pada ranah maskulin yang tidak ada terdapat ruang untuk perempuan. Pada zaman modern yang terus berubah ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dengan meningkatkan kesadaran akan peluang yang ada, membentuk kepercayaan diri serta keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Hal ini merupakan suatu proses yang penting agar kehadiran perempuan dalam arena politik tidak hanya sebatas formalitas belaka. Namun mampu memberikan manfaat terutama bagi seluruh kaum perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain membangun peran perempuan secara meluas dalam politik, sangat perlukan sistem yang meliputi proses perekrutan kader dan pemberdayaannya disertai dengan sistem pemilu yang ditetapkan. Disini terlihat pentingnya kontribusi dari partai politik untuk memberikan dukungan secara maksimal terhadap perempuan-perempuan yang terpilih sebagai kader untuk berperan penting di parlemen atau legislatif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam partai politik menurut feminisme ialah dengan

memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam mengembangkan kemampuan diri secara optimal dengan berbagai pendidikan yang sama dengan pria. Dengan pendidikan, perempuan akan mampu mengembangkan diri dan pemikiran untuk mendidik seorang anak dengan baik, dan hal ini juga berlaku untuk wanita yang memiliki peran dalam politik untuk turut andil dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan menjalankan peran pada posisi di lembaga kemasyarakatan atau pemerintahan yang terstruktur. Terutama dalam urusan keuangan dan kebutuhan umum seorang perempuan, serta posisi lainnya yang ditempatkan dalam posisi strategis untuk menjalankan peran-peran penting di masyarakat.

Kemampuan perempuan pada saat ini khususnya di Kota Tanjungpinang sudah tidak diragukan lagi. Mereka sudah dianggap mampu untuk menyampaikan aspirasi dan mengambil setiap keputusan untuk kepentingan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Di samping itu juga, dukungan dari anggota keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitar turut mempengaruhi kinerja mereka dalam setiap kali mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

B. Hambatan-hambatan Partai Politik dalam Akses Politik terhadap peran perempuan

Sejarah yang cukup panjang dalam perjuangan perempuan pada dunia perpolitik sangatlah dinamis dan pada akhirnya menimbulkan berbagai kondisi yang mempengaruhi partisipasi perempuan di dunia politik. Hingga saat ini masih banyak ditemukan dalam dunia politik keikutsertaan perempuan sangat rendah karena berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi setiap partai politik dalam membangun ketokohan perempuan yang terjun ke dunia politik di Kota Tanjungpinang adalah sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini :

1. Hambatan Struktural dan Kelembagaan

System politik Indonesia yang maskulin. Selanjutnya, perempuan-perempuan yang ingin berkontribusi kedalam partai politik masih banyak pertimbangan. Selain itu budaya dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan partai politik masih dianggap sebagai sesuatu yang "macho" atau sebagai ranahnya laki-laki. Mayoritas perempuan dalam kebudayaan patriarki ini meminggirkan diri dari dunia politik, sehingga partai kesulitan mencari kader perempuan yang mau bersaing dengan laki-laki bahkan di kalangan ibu-ibu kebanyakan lebih memilih seorang laki-laki sebagai kandidat yang dipilih untuk menduduki suatu jabatan di legislatif.

2. Hambatan Pribadi

Dunia politik terkonstruksikan dalam pemikiran masyarakat secara umum yang tergambar begitu keras yang menuntut perjuangan dan pengorbanan secara penuh dari kepribadian seseorang yang terlibat. Penyebab inilah yang menjadi rendahnya partisipasi perempuan di dunia politik, dimana kepercayaan diri perempuan kurang terbangun. Selain itu juga, faktor yang mendasari ialah karena keterbatasan seorang perempuan yang memiliki peran ganda lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki kewajiban untuk merawat keluarga, serta pekerjaan domestik lainnya membuat perempuan menjadi ragu untuk berkontestasi dalam politik.

3. Hambatan Sosio-Kultural

Dalam struktur sosial, secara kultural dimana sudut pandang patrinal (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang kehidupan (Monawarah, 2017:11) Karena perempuan tidak diberikan wewenang untuk mengambil keputusan sendiri tanpa

persetujuan keluarga maupun suami.

Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

4. Hambatan Ekonomi

Suatu paradigma yang berkembang saat ini terkait perjuangan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan di legislatif membutuhkan biaya (materi) yang besar. Seperti, melakukan kampanye ke masyarakat dijalankan dengan pengeluaran yang tidaklah murah sebagai ongkos politik. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan penyebab berkurangnya keberanian perempuan untuk terjun ke dunia politik (Farhah, 2018:7).

C. Strategi Partai Politik untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Kota Tanjungpinang

Berangkat dari kondisi perempuan dalam kehidupan sosial di masyarakat, bisa diamati bahwa betapa sedikitnya politisi atau keterwakilan perempuan yang berhasil duduk dalam jabatan tertentu di dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam hal ini perlu dibangun dan ditingkatkan dengan strategi-strategi yang telah dipetakan dan disusun dengan baik oleh partai sebagai bentuk kepedulian partai dalam memunculkan wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat banyak kalangan yang mengabaikan hak-hak perempuan dalam kehidupan social. Untuk itu kepentingan-kepentingan perempuan memang sebaiknya disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti dan memahami kebutuhan-kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, beberapa strategi dibangun oleh partai politik secara umum melalui berbagai pendekatan berikut ini :

1. Melalui Pendekatan Organisasi Perempuan

Melalui organisasi perempuan dalam partai politik mampu menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi dan membangun kerjasama antar anggota, pengurus bahkan turut serta dalam kegiatan koperasi guna meningkatkan perekonomian. Selain dari alur organisasi tersebut, partai politik lainnya terutama di PDIP juga menjurus strateginya melalui Ikatan Perempuan PDI Perjuangan menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa jalur seperti Ikatan Tenaga Kerja Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia Sehat, dan disertai dengan kegiatan yang dibangun dari partai untuk para kader perempuan dengan berbagai pendidikan dan sekolah-sekolah partai baik tentang administrasi kesekretariatan, pengelolaan administrasi keuangan serta pendidikan pancasila, organisasi dan politik. Kemudian di PKS juga ada bagian khusus yang mengurus tentang perempuan yang dinamakan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang merupakan ujung tombak dari partai dalam melaksanakan program-program khusus untuk perempuan dan keluarga. Selanjutnya di GOLKAR adanya organisasi andalan yang dibangun dari suksesnya kemenangan pemilu kader perempuan yang dinamakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang menjadi induk penggerak dari partai. Berangkat dari organisasi inti dari partai inilah setiap partai bergerak di berbagai kelompok-kelompok pengajian-pengajian dan berbagai bentuk kelompok arisan serta lembaga dan yayasan yang tersebar di masyarakat.

Melalui kegiatan ini juga kaum perempuan akan mendapatkan banyak manfaat, tidak

semata-mata hanya pada bidang ekonomi, akan tetapi mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap hal-hal lainnya. Antara lain kemampuan berorganisasi, semakin menguatkan kemampuan secara pribadi maupun secara kelompok dan berhimpun dalam kelompok, kemampuan pengambilan keputusan, serta kemampuan menjadi pemimpin di bidang politik. Peningkatan keterampilan juga mampu dikembangkan dalam berbagai bidang, misalnya komunikasi, manajemen keuangan, komputer dan lainnya.

Dalam teori feminisme pada *The Feminis Mistique* yang ditulis oleh Betty Frieden, dalam bukunya *The Second Stage* bahwa berkarir sekaligus menjadi seorang ibu rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat sulit, tidak hanya melayani keperluan suaminya, namun juga harus melayani anak-anaknya serta pekerjaan lainnya. Sehingga hal yang sangat perlu untuk segera dilakukan adalah dengan melakukan suatu gerakan. Kemudian timbulnya kesadaran terhadap keterbatasan-keterbatasan dalam dirinya sehingga mampu untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan upaya menjalin suatu koperasi dengan laki-laki untuk merubah *mindset* dalam kehidupan sosial masyarakat pada bidang publik dan privat. Hal ini dilakukan dengan cara suami juga harus ikut memikul beban keluarga dalam hal ekonomi, rumah tangga dan anak. Serta perempuan yang harus aktif dalam kegiatan keorganisasian.

2. Melalui Pendekatan Tokoh Masyarakat

Strategi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dilakukan dengan cara menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan perempuan terkait strategi yang digunakan salah satunya yang paling utama ialah membangun interaksi terhadap masyarakat secara luas terutama membangun interaksi terhadap tokoh masyarakat. Sehingga interaksi yang dibangun mampu menciptakan hubungan baik dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyumbangkan aspirasi-aspirasinya kepada masyarakat secara lebih luas. Karena untuk mengambil hati masyarakat maka strategi terbaiknya ialah membangun citra baik kepada tokoh masyarakat terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat Indonesia perspektifnya terhadap sesuatu dipengaruhi juga oleh tokoh masyarakat. Namun tidak semua kader perempuan dalam partai politik mampu membangun citra yang baik kepada tokoh masyarakat sehingga hal ini menjadi salah satu sumber permasalahan perempuan dalam menduduki suatu jabatan di dunia politik.

Ungkapan tersebut menggambarkan pernyataan dari para kaum feminisme liberal bahwa sumber permasalahan perempuan selama ini adalah karena perempuannya itu sendiri yang merasa belum mampu untuk maju memberikan kontribusi dan citra diri yang positif kepada masyarakat. Solusi yang harus dilakukan yaitu melalui pembekalan kaum perempuan dengan pendidikan dan juga pendapatan. Selain itu, perlunya bergerak secara massif, pergerakan ini jangan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, karena akan menghancurkan komunalitas. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya *committee organizer* untuk mengorganisasi masa. Upaya ini juga bisa digerakkan melalui tokoh masyarakat yang disegani untuk mengumpulkan masa, karena pada kenyataan sosial manusia pada dasarnya hidup berkelompok didalam masyarakat.

3. Melalui Pendekatan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memfasilitasi warga masyarakat pada sebuah urusan secara kolektif atau kepentingan bersama yang dapat mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai, menggerakkan suatu kampanye aksi, mengumpulkan sumber daya dan melalui semua ini akan membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas secara bersama-sama. Pendekatan ini dilakukan oleh beberapa partai dengan tujuan untuk meningkatkan

keterwakilan perempuan melalui jalur program-program yang dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu agar strategi dari partai berjalan dengan baik maka sangat diperlukan kemampuan mengelola komunikasi dan interaksi pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, partai Golkar dan juga diantara partai lainnya selalu mensupport dan menghadirkan perempuan-perempuan yang diusung dari partai untuk terus bersosialisasi dan memberikan solusi-solusi kepada masyarakat melalui program kemasyarakatan.

Selanjutnya strategi partai politik sangat diperhatikan melalui pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh partai dengan menguasai media sosial agar strategi yang dijalankan mampu menggerakkan seluruh kekuatan yang ada, serta mengoptimalkan segala peluang. Jaringan ini juga akan membawa sosok perempuan lebih dikenal luas dan perempuan yang berperan didalamnya juga akan mampu dan berani untuk turun ke masyarakat menangani segala hal yang harus dihadapi. Sehingga dengan pertahanan yang dibangun melalui program pemberdayaan masyarakat inilah kemampuan dalam menyelesaikan konflik sosial terutama mengenai kepentingan perempuan akan mudah terealisasi dengan baik.

Untuk itu, caleg perempuan harus mampu mengelola sistem komunikasi dengan baik serta ikut andil dalam program-program pemberdayaan di masyarakat. Komunikasi tersebut berfungsi untuk menyampaikan ide perubahan kepada masyarakat dengan cara yang santun dan bijak. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah menyerap ide perubahan yang ditawarkan dan sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir pemikiran-pemikiran masyarakat yang kurang memihak terhadap perempuan yang berperan dalam ranah politik.

Kesimpulan

Partai politik memiliki peran yang substansial bagi keberadaan perempuan untuk memiliki kedudukan di lembaga legislatif. Oleh karena itu partisipasi politik perempuan tidak akan maksimal apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik dengan menyusun strategi-strategi yang tepat dalam membangun dan meningkatkan peran-peran perempuan yang mampu memberikan kontribusi yang baik untuk individu, keluarga dan masyarakat.

Dalam penelitian ini juga peneliti melakukan suatu kajian dengan mengkaji strategi dari beberapa partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan pengumpulan data dari beberapa informan dengan jumlah yang terbatas, untuk itu pada penelitian mendatang agar data yang diperoleh lebih luas dan memuaskan. Maka peneliti menyarankan perlu adanya penambahan jumlah informan sebagai pendukung dan pelengkap data penelitian.

Adapun kelemahan dari segi metodologi penelitian ini secara kualitatif adalah hasil yang diperoleh peneliti disini tidak bisa melakukan generalisasi. Oleh karena itu, untuk riset yang akan datang disarankan untuk melakukan kombinasi metodologis kualitatif dan kuantitatif. Sehingga pada riset ini akan melahirkan generalisasi. Dalam hal ini riset ini pada waktu mendatang, akan ada para peneliti yang mampu menyempurnakan dan memperbaiki segala kekurangan yang ada dengan kajian yang sama dalam mengkaji strategi partai untuk meningkatkan peran perempuan di lembaga legislatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak dengan berbagai ilmu yang bermanfaat untuk berbagai kalangan terutama untuk kehidupan sosial masyarakat.

Referensi

- Farhah, A. S. A. & I. A. (2018). Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD). *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1–9.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902><http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>
- kiftiyah Anifatul. (2019). *Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia*. 6(April), 55–72.
- Monawarah, L. (2017). *KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAG LEGISLATIF KABUPATEN SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH Studi Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2014*. 5.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25.
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Putri, M. A., Hukum, F., Udayana, U., Sukerti, N. N., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *PENGARUH AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN*. 8(5).
- Said, A. . S. G. & M. D. (2007). *Sosiologi Politik*. CV PUSTAKA SETIA.

Data KPU Kota Tanjungpinang 2019

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan Umum Anggota PDR,DPD,DPRD